



PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN
DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAHAN (JT) PENSISTEMAN
(Sesuai UU PPN Pasal 4 ayat 1 Nomor 18 Tahun 2000)
PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

| | | |
|---------------|----------------------|---------|
| Asal: | Hadiyah Penitipan | Klass |
| Terim. gl. | | 336.271 |
| Tvc. indek : | | NN |
| Pengkatalog : | | J |

Oleh:

Suhartini Ningsih
NIM. 020903101165

Dosen Pembimbing

Drs. Purwowibowo, M.Si
NIP. 131 404 381

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

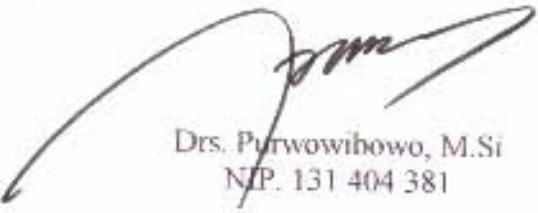
| | | |
|---------------|---|------------------------|
| Nama | : | SUHARTINI NINGSIH |
| NIM | : | 020903101165 |
| Jurusan | : | Ilmu Administrasi |
| Program Studi | : | Diploma III Perpajakan |
| Judul | : | |

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN
DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAHAN (JT) PENSISTEMAN
(Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) PADA PT. TELKOM
KANDATEL JEMBER**

Jember, Mei 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. Purwowibowo, M.Si
NIP. 131 404 381

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

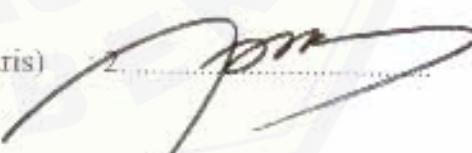
| | |
|---------------|--------------------------|
| Nama | : SUHARTINI NINGSIH |
| NIM | : 020903101165 |
| Jurusan | : Ilmu Administrasi |
| Program Studi | : Diploma III Perpajakan |

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAIAN NILAI ATAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN TAMBAIAN (JT) PENSISTEMAN (Sesuai UU PPN
Pasal 4 No. 18 Tahun 2000) PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Hari | : Kamis |
| Tanggal | : 30 Juni 2005 |
| Jam | : 18.00 WIB |
| Bertempat | : Di FISIP Universitas Jember |

Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

- | | | |
|---|--------------|------|
| 1. Drs. Agus Budihardjo, MA NIP. 130 879 634 | (Ketua) | : 1. |
| 2. Drs. Purwowibowo, M.Si NIP. 131 404 381 | (Sekretaris) | : 2. |
- 
- 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MOTTO

Bayarlah pajak sejak dulu, agar anak cucu kelak tidak meninduh bahwa kita telah hidup tidak berguna

(Berita Pajak no. 1455/th XXXIX, 2001:4)

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayurlah pajak karena seorang warga negara yang baik.

(Berita Pajak, 1996:257)

PERSEMPAHAN

Dengan rasa hormat, penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan kepada

1. Ayahanda Subartono dan Ibunda Srikesi yang telah menyulam bersama hingga jadilah aku yang selalu menyayangiku serta memberi dukungan setiap keputusan yang aku ambil.
2. Papaku Tersayang (M.Imam Syali), terima kasih sudah mendampingiku juga atas ruah kasihnya.
3. Kedua adhekkku Febri dan Danna, terima kasih atas keceriaan-kecerianan yang sudah kalian hadirkan.
4. Sahabatku Debby, Nikina dan Dian Giant, terima kasih atas dukungannya dan kesediaan kalian sebagai tempat pelarian di kala pikiranku penat selain Illahi Rabbi. Tiada yang lebih indah dari persahabatan antara kita
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan memerlukan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat ridho dan pertolongan-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “**Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Penjualan Jaringan Tambahan (JT) Pensistemkan Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000 Pada PT.Telkom Kandatel Jember**”. Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Progam D-III Perpajakan Materi ini di susun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Telkom Kandatel Jember sesuai dengan literatur dan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

Keberhasilan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bantuan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Bpk Dr. H. Uung Nasdia, B.Sw, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bpk Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNEJ.
3. Ibu Dra. Dwi Windradini, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
4. Bpk Drs. Rakhmad Murjana, MM selaku Dosen Wali yang telah sabar membimbing dan membantu proses belajar penulis sebagai Mahasiswa di FISIP UNEJ.
5. Bpk Drs. Purwowibowo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata
6. Bpk. Sutrisno, M.Si selaku Dosen Supervisor atas kesediaannya membantu Penulis selama kegiatan PKN
7. Bpk Lutfi Hanum selaku manger Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember

8. Seluruh Karyawan PT. Telkom Kunditel Jember khususnya bagian keuangan dan Logistik.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan FISIP Program Studi D-III Perpajakan UNEJ.
10. *The Big Family* Al-Qananga Titin, Cemuk, Mbk Lia, Mbk Ika, Luluk, Dina atas supportnya. Aku pasti akan merindukan keceriaan yang pernah kita lalui.

Di dalam penyajian laporan ini penulis merasa segala sesuatu yang telah dicurahkan untuk penulisan laporan ini menghasilkan suatu karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Harapan penulis mudah-mudahan Laporan ini dapat memperluas pandangan dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Jember, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMPERBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata | 3 |
| II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | 4 |
| 2.1 Sejarah Singkat Perundang-undangan PT. Telkom | 4 |
| 2.1.1 Restrukturisasi Internal Telkom | 5 |
| 2.1.2 <i>Initial Public Offering (IPO)</i> | 7 |
| 2.1.3 Visi dan Misi PT. Telkom | 8 |
| 2.2 Gambaran Umum Perusahaan | 9 |
| 2.2.1 Ruang Lingkup Usaha | 9 |
| 2.2.2 Identitas Usaha | 12 |
| 2.3 Struktur Organisasi | 12 |
| 2.3.1 Tugas dan Wewenang masing-masing Bagian | 13 |
| III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA | 21 |
| 3.1 Pelaksanaan PKN | 21 |
| 3.2 Deskripsi Kegiatan Perusahaan | 24 |
| 3.2.1 Subjek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai | 25 |
| 3.2.2 Mekanism Pengadaan Barang dan Jasa | 26 |

| | |
|---|----|
| 3.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 28 |
| 3.2.4 Pengenaan PPN Atas Pengadaan Dan Pemasangan Taringan Tambahan (JT) | 29 |
| 3.2.5 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai | 30 |
| 3.2.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai | 31 |
| 3.3 Penilaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Telkom Kandate Jember | 33 |
| IV. PENUTUP | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | 36 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL.

| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1: Jam Kerja Karyawan PT. Telkom Kandatel Jember..... | 22 |
| Tabel 2: Jam Kerja Karyawan PT. Telkom Kandatel Jember dengan Sistem Shift..... | 22 |
| Tabel 3: Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata..... | 23 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember | 13 |
| Gambar 2 : Struktur Organisasi Bagian Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember | 14 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Penerimaan Surat
2. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT
3. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT 1
4. SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT 2
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 5
6. Bukti Surat Setoran Pajak
7. Faktur Pajak
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003
9. Surat Tugas
10. Surat Keterangan Selesai Magang
11. Daftar Hadir PKN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara bagi setiap warga negara yang merupakan sarana dan peran serta dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pembiayaan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

- a. Bumi, air dan kekayaan alam.
- b. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
- c. Penerimaan negara bukan pajak (non-tax)
- d. Hasil perusahaan negara.
- e. Sumber-sumber lain seperti pencairan uang dan pinjaman.

Pajak merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan negara, hal ini di dukung dengan penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah semenjak tahun fiskal 1984, Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak self assessment di mana fiscus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyertor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan sistem pemungutan pajak terdahulu yaitu office assesment. Dalam sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiscus, wajib pajak dalam sistem ini bersikap pasif.

Sumber-sumber lain dari penerimaan negara selain pajak adalah pinjaman negara. Hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia masih menggantungkan kredit luar negeri sebagai faktor pemungkas dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi negara tersebut. Tampaknya kredit luar negeri sebagai pilihan utama dalam mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi, meskipun kredit luar negeri bukanlah satu-satunya pilihan dalam memacu pembangunan karena masih ada jalan yang bisa di tempuh tanpa kredit

luar negeri seperti pembebaran pajak. Dilihat dari dasar dan mekanisme pembebaran pajak di antaranya adalah:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau diliimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau diliimpahkan kepada orang lain.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi yang mempunyai tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola secara profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu PT. Telkom memberikan pelayanan yang lebih dan memuaskan kepada semua calon pelanggan dibidang telekomunikasi.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara yang telah mencapai anggaran *go public* adalah salah satu aset penerimaan kas negara yang terbesar terutama dalam hal pajak. Dari beberapa jenis pajak yang menjadi tanggungan PT. Telkom, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menduduki peranan vital artinya lebih besar daripada penerimaan pajak lainnya. Adapun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh PT. Telkom adalah Pajak Pertambahan Nilai atas jasa telekomunikasi dan pengadaan barang PPN atas pengadaan barang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh PT. Telkom dengan mitra/vendor. Pengadaan barang ini dilakukan sebagai salah satu sarana penunjang untuk perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk membahas mengenai mekanisme proses pengadaan barang serta proses pembayaran dan pelaporan PPN-nya. Sehingga penulis menuangkan dalam bentuk Laporan Praktek kerja Nyata dengan judul "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pensiteman (Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) Pada PT. Telkom Kandatel Jember"

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan PKN

Tujuan utama dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tujuan lainnya adalah :

- a. Ingin mengetahui lebih jauh mengenai Prosedur Pengenaan PPN atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambahan (JT) Pensiteman pada PT. Telkom Kandatel Jember.
- b. Ingin lebih memahami peranan PT Telkom Kandatel Jember sebagai Non Wajib (Wajib Pungut) terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

1.2.2 Kegunaan PKN

- a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kemampuan diri.
- b. Sebagai bekal penulis dalam menghadapi tantangan kerja dimasa akan datang.
- c. Untuk menjalin kerjasama antara PT. Telkom Kandatel Jember dengan pihak Universitas Jember Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program DIII Perpajakan.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perundang-undangan PT. Telkom

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Perusahaan umum telekomunikasi pada permulaannya bernama "Post En Telegraafdienst" yang didirikan pada tahun 1884 dengan *staatsblad en telefoon Dienst* dengan staatsblad no.395, sehingga disatukan dalam jawatan *Post telegroaf en telefoon Dienst*. Didalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1931 jawatan *Post Telegroaf en Telefoon Dienst* ditetapkan sebagai Perusahaan Negara. Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No.19 tahun 1966 tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara, ternyata *Post Telegroaf en Telefoon Dienst* memenuhi syarat menjadi Perusahaan Negara. Oleh karenanya jiwah *Post Telegroaf en Telefoon Dienst* diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dengan Peraturan Perundang-undangan No.240 tahun 1961.

Berdasarkan hal diatas maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan kembali, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 dan No.30 tahun 1965, terjadi pemecahan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi Dua Badan Usaha yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Sebagai Perusahaan vital yang bergerak dibidang sarana perhubungan dalam masa perkembangannya teknologi dan ekonomi serta dunia usaha lainnya sangat berpengaruh pada Perusahaan Negara Telekomunikasi. Kemudian pada tanggal 28 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.129/U/1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi yang disingkat Perumtel. Keberadaan Perumtel ini diukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelolah telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar negeri. Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum maka Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 dihadapkan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974, maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan

Perumtel sebagai Badan Usaha yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk dalam negeri, sedangkan untuk hubungan luar negeri (internasional) dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 diserahkan kepada PT Indosat. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang memberikan kemungkinan maximal untuk menjalankan usaha-usaha atau kegiatan, Perusahaan Negara Telekomunikasi ini harus memegang teguh prinsip *Efficiency, Effectivity, Economics, Cost Accounting dan Management Effectiveness*.

Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 dihadapan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974. Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum. Maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Perumtel sebagai Badan Usaha yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk dalam negeri, sedangkan untuk hubungan luar negeri (internasional) dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 diserahkan kepada PT. Indosat.

Memasuki Republik V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi karena sebagai infrastruktur diharap dapat mengacu pertumbuhan sektor lain. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih professional, oleh sebab itu perlu penyesuaian perusahaan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1983, tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJA), Perusahaan Umum (PPRUM) dan Perusahaan Perseorangan (PERSERO) maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1984 tentang PERUMTEL berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseorangan dengan nama PT Telkom Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1992 (diumumkan negara RI No.33 tahun 1991) dengan akte notaris Iman Patimah, SII No.128 tanggal 24 September 1991.

2.1.1 Restrukturisasi Internal Telkom

Mengantisipasi era globalisasi seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional maupun regional, maka telkom pada tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah

Restrukturisasi Internal, Penerapan Kejasama Operasi (KSO) dan persiapan *Go Public* atau internasional atau dikenal dengan *I initial Offering*.

Restrukturisasi internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang Usaha Telkom dibagi 13 yaitu

a. Bidang Usaha Utama

Bidang usaha utama adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri.

b. Bidang usaha terkait

Bidang usaha terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS),

Sirkuit Langganan, telex dan penyewaan transponder satelit. Bidang usaha terkait ini dan yang diselenggarakan Telkom dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan.

c. Bidang Usaha Pendukung

Bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha pendukung adalah pelatihan, sistem informasi satelit, *property*, riset, teknologi informasi

Penghapusan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom dalam menampung ketiga bidang usaha dan secara *de facto* meresmikan era Divisi sebagai WITEL, bisnis bidang usaha utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi diwilayah masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, Sumatera,
- 2) Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya,
- 3) Divisi Regional III, Jawa Barat,
- 4) Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- 5) Divisi Regional V, Jawa Timur.

- 6) Divisi Regional VI, Kalimantan;
- 7) Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya (kecuali Timor-Timur).

Ketujuh Divisi Regional PT. Telkom dikelola oleh suatu tim manajemen yang masing-masing terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (*divisi regional*) dan pusat keuntungan (*divisi network* dan divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah, sedangkan divisi pendukung terdiri dari pelatihan, divisi properti, divisi sistem informasi. Untuk memajang kelancaran operasional perusahaan, dibentuk unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadiwte V Jawa Timur No. Tel 1792/PS.159/RES-52/1996. Pada bulan Agustus 1996 diterapkan *Sistema Online Payment point* (SOPP) yang merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Perkembangan terakhir berdasarkan keputusan direksi PT. Telkom menambah dua divisi yaitu Divisi Multimedia dan *Divisi Network pembangunan*. Divisi Multimedia mengelola jasa multimedia dan *network provider* dimaksudkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi pembangunan termasuk divisi penunjang. Kerja sama operasi dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya. PT. Telkom mengikuti sertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya.

2.1.2 Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual saham Telkom, yang tertuang dalam Akta Berita Acara No.52 tanggal 17 Juni 1995 di buat oleh Imais Fatimah, SH. Untuk itu Telkom mencatat saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

Saham yang di keluarkan Telkom terdiri dari saham seri A Dwi Warna dan saham B Dwi Warna yang jumlahnya satu lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat di pindah tangankan kepadai siapapun. Saham seri A

Dwi Warna adalah saham diberikan kepada pemegang saham diantaranya menenjukai pencalonan, pengangkatan dan pembeheitian para anggota direksi yang dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham sedangkan saham seri B adalah atas nama dan dapat di pundihtangkan.

Karyawan PT Telkom dalam kaitan IPO ini khususnya mendapat penjatahan khusus sejumlah saham seri B1, batu yang jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP). Dan mengharuskan karyawan untuk tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatuan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerima program investasi perusahaan sekitar 39,22% digunakan untuk kapasitas transmisi dan sentral. Penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan *Wireless Local Loop*. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia. Semua usaha Telkom ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun internasional, kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan Telkom menjadi salah satu operator telekomunikasi kelas dunia (*World Class Operator*).

2.1.3 Visi dan Misi PT.Telkom

Usaha untuk mewujudkan diri sebagai perusahaan *infocom* yang memimpin di kawasannya, PT. Telkom Kandatel Jember diharapkan memiliki pendapatan perusahaan yang sejajar atau minimal mampu meminimalkan kesenjangan. Dan tahun 2005 ini PT. Telkom Kandatel Jember terbukti dapat di seajarkan dengan perusahaan Telkom yang ada di Asia. "*To Become a Leading Infocom Company in Region*" merupakan visi PT. Telkom Kandatel Jember artinya dalam menghadapi persinggan bebas PT. Telkom Kandatel Jember bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk mencapai visi tersebut maka dalam hal ini

PT Telkom Kandatel Jember menerapkan ISO *International Standard Organisation* yang menjamati setiap proses kerja yang ada di PT Telkom Kandatel Jember menjadi berkualitas untuk memberi kepuasan kepada pelanggan, karyawan, dan pemilik perusahaan kelas dunia.

Perusahaan Telekomunikasi Kandatel Jember menyediakan pelayanan kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan di bidang jasa telekomunikasi yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Di bidang ekonomi misalnya penyediaan telpon koin dan kartu. Di bidang pembangunan umum dengan masing-masing jumlah pajak yang di setor kepada pemerintah. Hal ini berarti penerimaan negara juga meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.

2.2 Gambaran Umum Perusahaan

2.2.1 Ruang Lingkup Usaha

Kegiatan usaha PT. Telkom yang memberikan pendapatan terbesar adalah jasa telekomunikasi. Komposisi pendapatan ini meliputi biaya abonemen bulanan, dan biaya pemakaian telepon. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. Telkom juga memperoleh pendapatan dari interkoneksi dan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya seperti penyelenggaraan telekomunikasi lainnya seperti penyelenggaraan telekomunikasi Internasional. Berikut adalah pelayanan jasa di PT. Telkom

a. Jenis jasa *Plain Ordinary Telephony System*

1) Telepon

Adalah jenis layanan jasa yang di perumukkan bagi pengguna untuk berkomunikasi (*pengiriman suara voice*) jarak jauh, seperti penyampaian dan penerimaan informasi dalam bentuk suara.

2) Telex

Merupakan jenis jasa telekomunikasi untuk mengirimkan dokumen tertulis menggunakan terminal (eleprinter / telex). Komunikasi antara dua terminal berlangsung secara real time dan dapat berupa komunikasi searah maupun dua arah.

b. Jenis jasa fitur

1) Lacak

- Fasilitas untuk mengalihkan panggilan telepon ke nomor yang dikehendaki oleh pemakainya.
- Pengalihan bisa ke telepon inasa, interlokal, internasional maupun telepon seluler.
- Panggilan dialihkan jika tidak dijawab atau sedang sibuk.

2) Andara

- Direct Hotline* adalah Fitur sentral yang memungkinkan pesawat telepon secara otomatis terhubung ke nomor tertentu langsung setelah *Handset* (gagang telepon) diangkat
- Dengan adanya fitur ini maka untuk pemakaiannya pesawat telepon tersebut tidak memerlukan proses dial, dan hanya dapat tersambung ke nomor yang sudah ditetapkan. Hal ini akan menguntungkan pelanggan (pemakai), karena tidak perlu menghapalkan nomor telepon tujuan, dan akan terhindar dari kemungkinan salah sambung.
- Fitur ini tidak memerlukan aktivasi dan deaktivasi oleh pelanggan tetapi sudah ditangani oleh operator sentral

3) Nada Sela

- Fasilitas pada layanan telepon yang memungkinkan untuk mengetahui panggilan telepon lain yang hendak masuk pada saat sedang melakukan pembicaraan
- Diumungkinkan juga untuk mengadakan pembicaraan dengan penelpon pertama atau penelpon kedua secara bergantian

4) Trimitra

- a) Trimitra merupakan fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan panggilan lain pada saat sedang berbicara lewat telepon.
- b) Fasilitas ini memungkinkan untuk melakukan pembicaraan tiga arah pada waktu bersamaan dengan dua rekan / keluarga anda lainnya.

5) Telkom Memo

- a) Fasilitas pengalihan panggilan untuk penipian pesan berupa voice maupun fax jika telepon sibuk atau tidak diangkat.
- b) Pelanggan tidak perlu menambahkan perangkat

6) Sandi Nada

Fasilitas pada layanan telepon untuk mensandikan nomor telepon yang dipanggil menjadi nomor yang singkat dan mudah diingat.

c. Jenis Value Added Service (VAS)

1) Freecall

Freecall atau 0800 adalah layanan bebas pulsa dimana pemanggil dapat melakukan panggilan ke pelanggan *Freecall* tanpa dikenakan biaya pulsa. Seluruh biaya pertukaran pulsa (tarif normal) dibebankan pada pelanggan *Freecall*.

2) Personal Freecall

- a) *Personal Freecall* adalah layanan bebas pulsa dengan kode akses 0800-144-X;X;X:X yang di lengkap dengan PIN sebagai nomor identitas pribadi.
- b) PIN digunakan sebagai nomor verifikasi panggilan sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses nomor *personal freecall* pelanggan.

3) Permata

- a) Permata merupakan fasilitas yang memungkinkan beberapa orang melakukan pembicaraan bersama melalui telepon bersama melalui telepon biasa.

- b) Dapat digunakan sampai dengan maksimal 30 orang dalam waktu yang bersamaan (antar 20 telepon), satu orang sebagai moderator / *chairman* dan 29 orang sebagai peserta (*conference*).
- c) Mengadakan telepon biasa.

4) Telkomnet Instant

Salah satu layanan dari PT. Telkom yang menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk menikmati fasilitas internet tanpa harus melakukan registrasi, tidak perlu membayar biaya registrasi dan biaya berlangganan.

2.2.2 Identitas Usaha

Perusahaan Telekomunikasi Kadiatei Jember terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 19 Januari 1989, sehingga PT. Telkom mempunyai Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor registrasi 000524-6269, yang menyatakan bahwa PT. Telkom yang beralamatkan Jl. Gajah Mada no. 182-184 Kecamatan Kaliwates Jember 68133, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 1.000.013.1-626 dan kode seri faktur pajak CEXB3-626. jenis usaha yang dijalankan PT.Telkom adalah jenis usaha yang belum jelas batasannya, karena menyangkut jasa telekomunikasi dan informasi. Dengan diterbitkannya KEP-294/WPL.09/KP.1703/2000, maka PT. Telkom di tetapkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak.

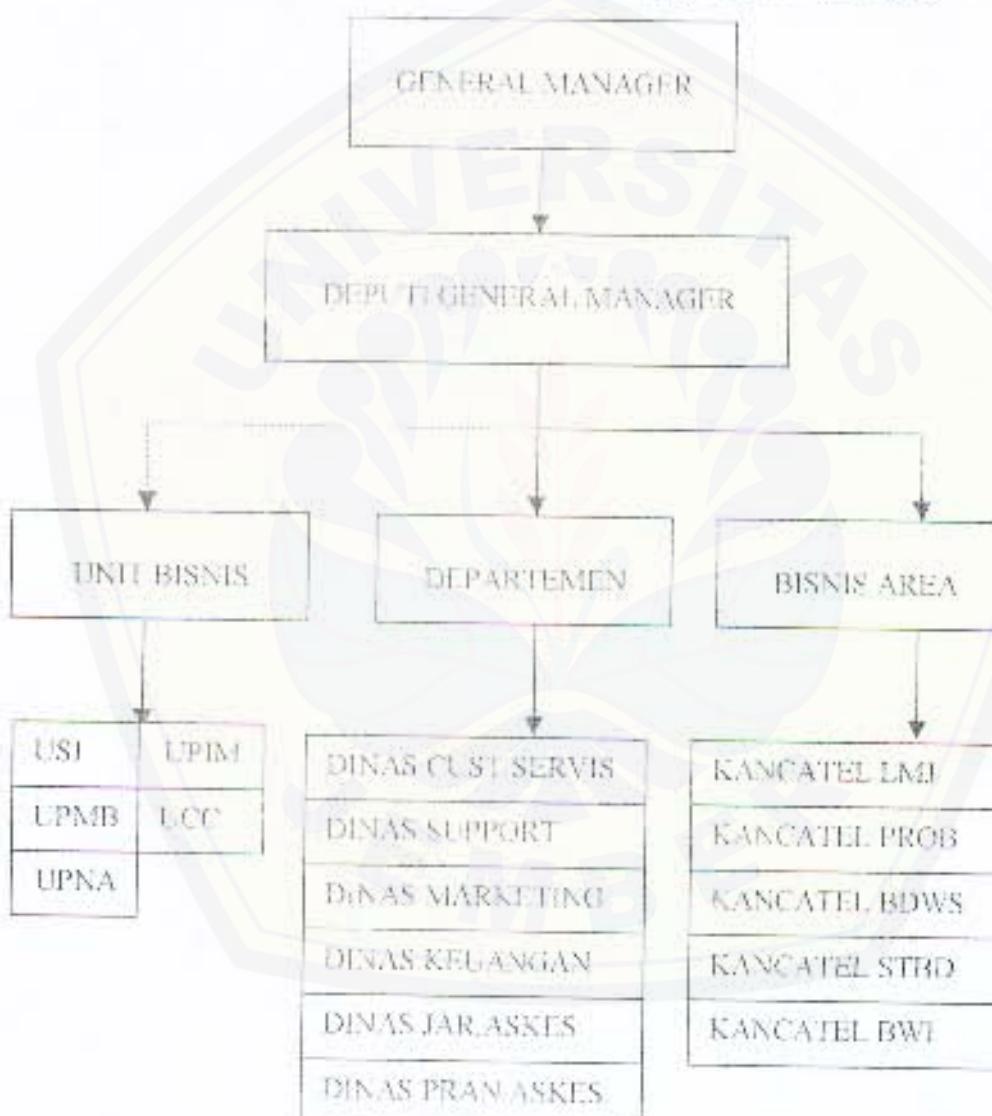
2.3 Struktur Organisasi

Kegiatan organisasi memerlukan pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan yang lain serta orang yang satu dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan bekerja sama. Definisi organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki di mana selain terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Bentuk organisasi PT. Telkom Kandatel Jember adalah bentuk organisasi garis dan staf. Seorang *General Manager* dibantu oleh seorang *Deputy General Manager*. *Deputy General Manager* sendiri dibantu oleh beberapa manager. Dari bagian itu masih terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Gambar 1

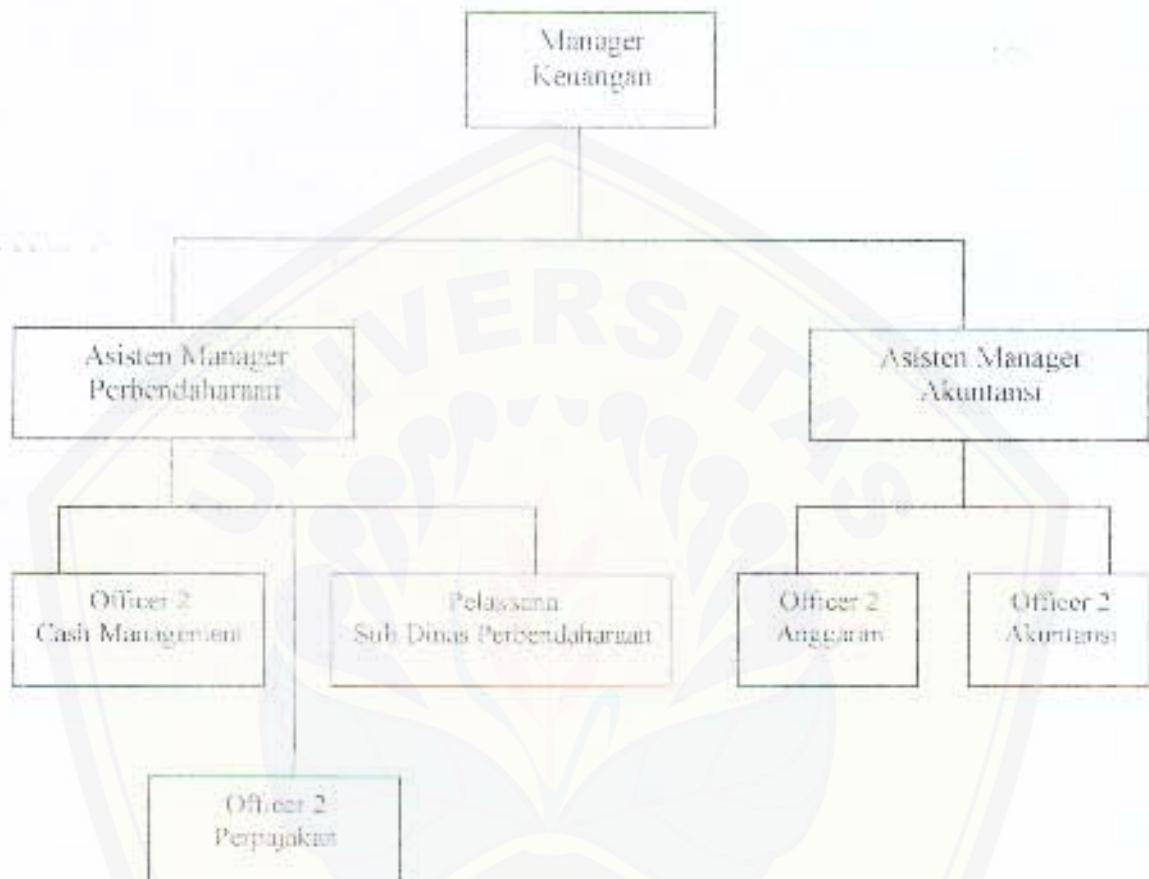
STRUKTUR ORGANISASI PT. TELKOM KANDATEL JEMBER



Sumber Data: PT. Telkom Kandatel Jember, 2005

Gambar. 2

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN



Sumber Data : PT. Telkom Kairatne Jember, 2005

2.3.1 Tugas dan Wewenang masing-masing Bagian.

a. General Manager

Tugas Utama :

- 1) Mencapai dan berlenggung jawab terhadap pencapaian kerja operasional.
- 2) Pembangunan jasa telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel berjalan sesuai dengan rencana.
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel berjalan dengan baik.
- 4) Strategi bisnis Kandatel dapat di kenaikan.

Wewenang .

- a) Menentukan strategi bisnis dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- b) Mengkoordinir pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan perangkat operasional bisnis kandatel.
- c) Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern untuk mendukung operasional.

b. Deputy General Manager

Tugas Utama :

Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Datel melalui penyediaan layanan jasa, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pulsa, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Wewenang

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan
- 3) Mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk melaksanakan pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan.
- 4) Mengelola dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan.
- 5) Mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kandatel.

- 6) Mengelola sumber daya untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kantor.

c. Manager Marketing

Tugas Utama:

Merencanakan promosi (pengiklanan), menangani *public phone*, serta mengusahakan pencapaian target.

d. Manager Operasional Harian (OpHar) Jaringan Akses

Tugas Utama:

- 1) Membantu *General Manager* dalam menyusun dan menganalisa *Business Plan*.
- 2) Mengkoordinir perencanaan sesuai dengan bisnis Infocom untuk penyediaan alat produksi.
- 3) Mengkoordinir data jaringan akses.
- 4) Mengkoordinir administrasi dan dukungan akses untuk kelancaran operasional harian jaringan akses.

e. Manager Customer Service

Tugas Utama:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan, rekanan, maupun dimas-dimas pemerintahan dalam pemberian jasa.

f. Manager Support

Tugas Utama:

Mengelola pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia, pengadaan barang, sarana, gedung, *securities* dan sebagainya, mengelola manajemen mutu.

g. Manager Keuangan

Tugas Utama:

Meningkatkan dan menevaluasi performasi Datel dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, beban, *cash flow* (aliran kas) serta menyelenggarakan akuntasi dan pelaporan keuangan.

Wewenang :

- 1) Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pengelolaan anggaran akuntansi Datel.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan kesekretariatan keuangan.
- 3) Pengambilan keputusan management Datel.
- 4) Menyelenggarakan pengolahan data.

Manager Keuangan membawahi :

h. Asisten Manager Perpendidikan

Tugas Utama

- 1) Menggerjakan administrasi dinas keuangan.
- 2) Membantu kelancaran operasional administrasi dinas keuangan.
- 3) Melakukan administrasi dan pengawasan pembayaran.

Wewenang :

- a) Melakukan dokumentasi terhadap bisnis proses dinas keuangan.
- b) Membantu penyediaan data dan informasi operasional serta penyediaan compack untuk menghasilkan Kertas Kerja Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

i. Asisten Manager Anggaran Akuntasi

Tugas utama :

- 1) Melaksanakan pengawasan penerimaan kredit dan tunai.
- 2) Melakukan validasi atas penerimaan pembayaran baik secara fisik dan administrasi.
- 3) Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi, kewajiban saldo dari pendapatan tunai.

Wewenang :

- a) Membuat register pengawasan penerimaan dan transfer dari masing-masing Bank Operasional.
- b) Membuat laporan berkala untuk keperluan evaluasi managemen.

- c) Berlanggung jawab atas pencatatan transaksi dan kewajaran dari penerimaan piutang.

j. *Officer 2 Cash Management*

Tugas Utama :

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan cash flow.
- 2) Mengelola, mengawasi, dan mengendalikan kas bank.
- 3) Memyediakan dan mendistribusikan dana operasional dan investasi.
- 4) Mengamankan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak

Wewenang :

- a) Menetapkan jadwal pembayaran dan menentukan keabsahan bukti pembayaran.
- b) Melakukan pengawasan pembukuan setoran pendapatan harian dan rekening koran.
- c) Monitoring pelaksanaan harian oleh bank dan membuat laporan pencapaian target transfer.
- d) Melakukan input data penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam modul SIMAK.
- e) Melaksanakan pengelolahan administrasi keuangan antar kantor.
- f) Melakukan rekonsiliasi bank dan memberi bantuan menyelesaikan Kertas Kerja Pemeriksaan tutup buku.

k. *Officer 2 Anggaran*

Tugas Utama :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran beban dan investasi.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap usulan justifikasi dan realokasi anggaran beban dan investasi.

Wewenang :

- a) Mererkomenasikan diterima atau ditolaknya usulan aktivitas.
- b) Menghitung rasio-rasio *indicator performance* anggaran Dafel dan Cotel.

- c) Melakukan negosiasi dengan user apabila terdapat usulan kegiatan yang tidak efisien.
- d) Membuat laporan berkaitan tidak kepuasan evaluasi *management*.
- e) Memberikan umpan balik tentang *performance* pencapaian realisasi beban.

i. Officer 2 Akuntasi:

Tugas Utama

- 1) Menjamin semua transaksi keuangan.
- 2) Memelihara sistem dan prosedur transaksi.
- 3) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan.
- 4) Membuat analisis dan pengujian laporan keuangan.

Wewenang

- a) Melaksanakan rekonstruksi kas/bank/SIMAK dan mengusulkan metode dan prosedur akuntansi.
- b) Memelihara modul SIMAK.
- c) Melakukan validasi program dan megevaluasi transaksi keuangan.
- d) Menyajikan laporan bulanan dan menyelesaikan Kertas Kerja Penilaian tutup buku.
- e) Menganalisa laporan keuangan
- f) Memberikan bimbingan teknis penyelesaian laporan keuangan.

m. Officer 2 Perpajakan

Tugas Utama :

Menjamin pelaksanaan sistem perpajakan yang dilaksanakan di kandatel sesuai dengan wewenang dan peraturan yang berlaku

Wewenang :

- 1) Menyusun *tax planning* secara menyeluruh.
- 2) Menghimpun dan melaksanakan semua komponen pajak.
- 3) Memastikan aktivitas wajib pajak apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Bertanggung jawab atas keabsahan faktur pajak

- 5) Bertanggung jawab atas pengendalian dokumen.
- 6) Bertanggung jawab atas penilaian Surat Pemberitahuan(SPT) masa dan tahunan.
- 7) Melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas pengkreditan pajak.
- 8) Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang akan di sajikan dalam laporan keuangan.
- 9) Membuat laporan berkala dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

n. Pelaksana Sub Dinas Perbentaharaan

Tugas Utama

- 1) Melakukan verifikasi keabsahan suatu kewintasan setiap transaksi behar.
- 2) Melakukan rekonsiliasi tiap bulannya dan menindak lanjut terhadap beban yang di TAK-KAN (Transaksi Antar Kantor).
- 3) Mengamankan semua transaksi keuangan.
- 4) Membantu kelancaran operasional administrasi keuangan.

Wewenang :

- a) Melakukan verifikasi dan koreksi serta mengklasifikasikan semua transaksi.
- b) Melakukan dokumentasi terhadap bisnis proses dinas keuangan.
- c) Membantu penyediaan data dan informasi operasional serta menyediakan compack untuk menghasilkan Kertas kerja Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tutup buku.
- d) Validasi dan reporting (pelaporan) terhadap cash desk loket pembayaran.
- e) Melakukan rekonsiliasi secara harian antara penyetoran yang dilakukan oleh CA (*Collection Agent*/loket pembayaran pastel) ke Bank Operasional

IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis parajarkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, Ridho dan Pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Tambalan (JT) Pensiteman (Sesuai UU PPN Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2000) Pada PT Telkom Kanditel Jember." Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan di PT Telkom Kanditel Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Telkom Kanditel Jember bukan Wajib Pungut dan rencananya akan mencanangkan *gratuit*. Meskipun demikian PT. Telkom Kanditel Jember akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kamor Pelayanan Pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang pada setiap transaksi mempunyai hubungan erat dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi besar pada perolehan pajak. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan PT. Telkom Kanditel Jember sudah sesuai prosedur.

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan melalui penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Dalam memasuki era kompetensi saat ini, PT. Telkom Kanditel Jember sebagai badan usaha dalam sektor komunikasi hendaknya mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dengan kompetitornya. PT. Telkom Kanditel Jember mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan yang berbasis pelanggan bila tidak ingin kalah bersaing
- b. Perusahaan Telekomunikasi harus memegang teguh komitmen dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT. Telkom Kandatel Jember bagian keuangan yang telah banyak membantu Penulis mencari data-data dan atas bimbingan-bimbingan yang di berikan. Dengan penulisan Laporan PKN ini, penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengenaan Pajak Penambahan Nilai atas pengadaan barang. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sihinya membangun dari semua pihak agar Laporan Praktek Kerja Nyata ini menjadi lebih baik dan bermanfaat karena penulis merasa isi Laporan Praktek Kerja Nyata ini jauh dari sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Bohari.2002. *Pengantar Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. P.I. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. *Perposakan Edisi Revisi 2000*.

PT. Telekomunikasi Indonesia. 2004. *Simpli Nenyepter Edisi III Akhir*. Bandung. Kantor Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

..... Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Penerimaan Surat
2. SPT Masa PPN Formular 1104 PPN
3. SPT Masa PPN Formular 1104 PPN 1
4. SPT Masa PPN Formular 1104 PPN 2
5. Surat Setoran Pajak (SSP) Lenbar 5
6. Bukti Surat Setoran Pajak
7. Faktur Pajak
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003
9. Surat Tugas
10. Surat Keterangan Selesai Magang
11. Daftar Hadir PKN

BUKTI PENERIMAAN SURAT

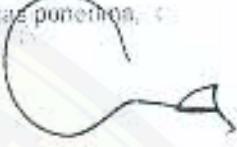
Nomor : 10000000000000000000000000000000

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms./Thn Pajak :

Petugas penenerima:



NIP :

Lampiran 1
Keputusan Deputi Kajur Perajak
Nomor : KEP-511/P.02/2001
Tangga : 13 Juli 2001

|  ARTEMEN KELJANGAN R. TORAT JENDERAL PAJAK | SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) | | Lampiran 2 FORMULIR 1101 PUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|----------------|---|---------|-------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------|--|--|--------------------|---------|------------------------------------|--|--|-------|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|--|--|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--|--|--|---|--|--|--|-------|--|--|--------------------------------------|-------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Masa Pajak : J - B - I - 1 - 2003 <input type="checkbox"/> Tanggal Surat Pengiriman : 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Petahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BACAUAN TERSEDIA DI MULAI DARI : UNJIK PENGISIAN SPT MASA PPN - UNJIK PENGISIAN HARGA OLEH KELAS KETIK - DIBATIKAH TAHUN SATU MASA PAJAK - BCAH TANDA X DALAM <input type="checkbox"/> YANG SESUAI - ANGKA DALAM RUPIAH PLNCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IDENTITAS PENGUSAHANA KENA PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">NPWP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0 1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0 0 0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0 1 + 3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0 2 0 0 0 1</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Nama PKA:</td> <td colspan="5">PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA</td> <td style="text-align: right;">Perubahan (contoh)</td> </tr> <tr> <td>Alamat:</td> <td colspan="5">JL. RAJAH MADA NO. 182 - 184 JLMBR</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Nama Baru</td> </tr> <tr> <td>Nomor Telepon:</td> <td colspan="5">16331 - 16343 - 16344</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Alamat Baru</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan Usaha:</td> <td colspan="5">JASA AIRPORT</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> No. Telepon Baru</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Jenis Usaha</td> </tr> </table> | | | | NPWP | 0 1 | 0 0 0 | 0 1 + 3 | 1 | 0 2 0 0 0 1 | | Nama PKA: | PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA | | | | | Perubahan (contoh) | Alamat: | JL. RAJAH MADA NO. 182 - 184 JLMBR | | | | | <input type="checkbox"/> Nama Baru | Nomor Telepon: | 16331 - 16343 - 16344 | | | | | <input type="checkbox"/> Alamat Baru | Kegiatan Usaha: | JASA AIRPORT | | | | | <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru | | | | | | | <input type="checkbox"/> Jenis Usaha | | | | |
| NPWP | 0 1 | 0 0 0 | 0 1 + 3 | 1 | 0 2 0 0 0 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama PKA: | PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA | | | | | Perubahan (contoh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat: | JL. RAJAH MADA NO. 182 - 184 JLMBR | | | | | <input type="checkbox"/> Nama Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Telepon: | 16331 - 16343 - 16344 | | | | | <input type="checkbox"/> Alamat Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Usaha: | JASA AIRPORT | | | | | <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Jenis Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MBAYARAN ATAS PEROLEHAM BARANG KENA PAJAK DAYA ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PEGUN AN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)</p> <p>PPN yang Pertambahan Nilai (PPN)</p> <p>Pembayaran yang dibungut PPN</p> <p>Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Bank Daerah/Bank Negara atau Kas Daerah/Bank Negara dan setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Dikur (kode B.1.1 - kode B.1.2)</p> <p>Pembayaran Atas Barang Mewah (PPNBM)</p> <p>Pembayaran yang dibungut PPNBM</p> <p>Pembayaran yang PPN BM-nya dibungut melalui Bank Daerah/Bank Negara atau Kas Daerah/Bank Negara dan setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Dikur (kode B.2.1 - kode B.2.2)</p> <p>K YANG HARUS DIPUNGUT DAN C DILAKUKAN Pembayaran yang dibungut PPN</p> <p>PPN yang dipungut melalui Kantor Perbelanjaan (kantor, kantor negara atau Bank Pembangunan Desa) (kode C.1.1 - C.1.2)</p> <p>PPN yang dibungut dan disetor sendiri (kode C.1.1 - kode C.1.2)</p> <p>Pembayaran Atas Barang Mewah (PPNBM)</p> <p>Pembayaran yang dibungut PPNBM</p> <p>Pembayaran yang PPN BM-nya dibungut melalui Kantor Perbelanjaan atau Kas Daerah/Bank Negara dan setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Dikur</p> | | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">KODE</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">PEMBE TULAN</th> <th colspan="2" style="width: 80%;">DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Bulan</th> <th style="width: 40%;">di Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.1.1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.856.784.440,00</td> <td style="text-align: right;">22.2.3.531.050,00</td> </tr> <tr> <td>B.1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.1.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.2.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | KODE | PEMBE TULAN | DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) | | Bulan | di Bulan | B.1.1 | | 1.856.784.440,00 | 22.2.3.531.050,00 | B.1.2 | | | | B.1.3 | | | | B.2.1 | | | | B.2.2 | | | | C.1.1 | | | | C.1.2 | | | | C.2.1 | | | | C.2.2 | | | | C.2.3 | | | |
| KODE | PEMBE TULAN | DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bulan | di Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | | 1.856.784.440,00 | 22.2.3.531.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>GRAN</p> <p>FORMULIR 1101 PUT 1</p> <p>FORMULIR 1101 PUT 2</p> <p>GRAT KUASA KUSUS TERSEDIA PAGE 2</p> <p>TO COPY SPT LEMBAR KE 1 TERSEDIA PAGE 1</p> <p>BANYAK... LEMBAR</p> <p>KTUR PAJAK SEMUAKE ATAU SEBUJI PADA : 1 - BAH. 009.000.000</p> <p>TO COPY FAKTUR PAJAK TERSEDIA PAGE 1</p> <p>SEMUAKE LEMBAR</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Republikan Dikut Jember, Prov.
Nama : KEP.51/UR.0201
Tanggall: 13 Jul 2001

PERNYATAAN

Saya menyatakan sepenuhnya bahwa dalam surat ini terdapat fakta-fakta yang telah dituliskan dalam surat ini dan lampiran tanpa penyelesaian adil sebagaimana berikut:

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 apabila SPT masa yang dimaksud sempai ke Unit atau Dinas perpajakan dalam keadaan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT dimaksud dianggap tidak disampaikan.

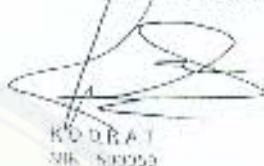
Pemungut

Kusa

SI OLEH DINAS

Jember, Tgl 16 AGUSTUS 2003

Pemungut Pajak / Gendhaasaceer
PTT LKBN JAMBIAT JEMBER



KODA 1
NIK. 50000

Tanda Tangan
Nama Juben
Cetakan

| Golongan | Dicatat | Unit | Diketahui | No. Surat | Rincian | Berita Acara |
|----------|---------|------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | | | | | |

Tanda Waktu

Telah dibacakan



**DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH**

**FORMULIR
1101 PUT 1**

LAMPIRAN - I

DEPARTEMEN KEUANGAN

Masa Pajak : JULI , 2003

Pembayaran Lainnya

I amien,
Ketuaan Direktorat Keuangan
Nomor KEP-511/F.02/01
Tanggal 12 Juli 2001

| NOMER | NAMA PENGSETOR | PENGGUNA | JENIS PENGSETOR | PERIODE | TANGGAL | JENIS PENGSETOR | PERIODE | TANGGAL | JENIS PENGSETOR | PERIODE | TANGGAL | JENIS PENGSETOR | PERIODE | TANGGAL | |
|----------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|---------|------------|-----------------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | PT HONDA SUDIRMAN | PT | PPN | 02 - 12-04 | 64905.4000000000000000 | 06 - 05 | 4908 | 30 | 30.000.000 | 01-05 | 262.00 | 01-05 | 20.000.000 | 01-05 | 1.000.000 |
| 2 | CV BKOA PLASA | PT | PPh | 02 - 20-2003 | 64930.6240000000000000 | 26 - 07 | 2003 | 2 | 400.000.00 | 30-06 | 000.00 | 30-06 | 000.00 | 30-06 | 000.00 |
| 3 | SUMBER BUMBUH | PT | PPN | 03 - 07 | 3003 | 14-08-2003 | 12 | 75 | 2003 | 2 | 75.000.00 | 01-05 | 750.00 | 2 | 75.000.00 |
| 4 | KOMUNITAS BEM | PT | PPN | 03 - 07 | 3003 | 0540-326-00001522 | 17 | 07 | 2003 | 2 | 75.000.00 | 29-06 | 652.20 | 2 | 75.000.00 |
| 5 | QUREHTECH INDONESIA | PT | PPh | 03 - 07 | 3003 | 0540-522-00001328 | 29 | 07 | 2003 | 2 | 700.000.00 | 29-06 | 000.00 | 2 | 700.000.00 |
| 6 | KOMUNITAS CEMARA | PT | PPN | 03 - 07 | 3003 | 0540-522-00001327 | 29 | 07 | 2003 | 2 | 700.000.00 | 29-06 | 000.00 | 2 | 700.000.00 |
| 7 | PT BINTANGARAJA | PT | PPh | 03 - 07 | 3003 | 0540-526-2007110 | 20 | 07 | 2003 | 2 | 850.000.00 | 30-06 | 000.00 | 2 | 850.000.00 |
| 8 | PT BINTANGARAJA JEMBER | PT | PPh | 03 - 07 | 3003 | 0540-526-2007110 | 21 | 08 | 2003 | 2 | 420.000.00 | 11-07 | 000.00 | 2 | 420.000.00 |
| 9 | PT BINTANGARAJA JEMBER | PT | PPh | 03 - 07 | 3003 | 0540-526-2007110 | 21 | 08 | 2003 | 2 | 420.000.00 | 11-07 | 000.00 | 2 | 420.000.00 |
| 10 | KOESTEL JAKARTA | PT | PPh | 04 - 07 | 2003 | CEV1-200-2007524 | 19 | 01 | 2003 | 2 | 957.000.00 | 01-07 | 000.00 | 2 | 957.000.00 |
| 11 | PT VOKSAT FUTURIC IND | PT | PPh | 04 - 07 | 2003 | 251AD-426-0000150 | 10 | 01 | 2003 | 2 | 857.000.00 | 01-07 | 000.00 | 2 | 857.000.00 |
| 12 | PT VOKSAT FUTURIC IND | PT | PPh | 18 - 07 | 2003 | CEV1-200-001774 | 17 | 01 | 2003 | 2 | 750.000.00 | 17-07 | 000.00 | 2 | 750.000.00 |
| 13 | PT BARSKAJA JEMBER | PT | PPh | 18 - 07 | 2003 | TAPE2-2128-0000008 | 10 | 01 | 2003 | 2 | 654.200.00 | 10-07 | 000.00 | 2 | 654.200.00 |
| 14 | CV STAR TECH SURABAYA | PT | PPh | 18 - 07 | 2003 | TAPE1-208-0000002 | 01 | 01 | 2003 | 2 | 450.000.00 | 01-07 | 000.00 | 2 | 450.000.00 |
| 15 | CV STAR TECH SURABAYA | PT | PPh | 18 - 07 | 2003 | TKRSCC-626-0000034 | 04 | 01 | 2010 | 2 | 310.000.00 | 130-03 | 00 | 2 | 310.000.00 |
| 16 | KURETHETI JEMBER | PT | PPh | 08 - 07 | 2003 | CEV1-200-001331 | 30 | 05 | 2003 | 2 | 151.200.00 | 21-05 | 000.00 | 2 | 151.200.00 |
| 17 | KOPI KEDARATAH HOTEL MALLANG | PT | PPh | 09 - 07 | 2003 | DEPDC-423-0000029 | 20 | 05 | 2003 | 2 | 452.200.00 | 4-05 | 000.00 | 2 | 452.200.00 |
| 18 | SADUJA MADJUV MEGAH JR | PT | PPh | 09 - 07 | 2003 | N+KLJ-626-0002204 | 30 | 06 | 2003 | 2 | 200.000.00 | 6-05 | 000.00 | 2 | 200.000.00 |
| 19 | PT SUCACO JAKARTA | PT | PPh | 08 - 07 | 2003 | NFRKL-4028-0100023 | 25 | 06 | 2003 | 2 | 153.600.00 | 12-05 | 000.00 | 2 | 153.600.00 |
| 20 | PT SUCACO JAKARTA | PT | PPh | 08 - 07 | 2003 | CEYFI-054-0000564 | 29 | 05 | 2003 | 2 | 900.000.00 | 5-05 | 000.00 | 2 | 900.000.00 |
| 21 | PT SUCACO JAKARTA | PT | PPh | 08 - 07 | 2003 | CEYFI-054-0004474 | 15 | 05 | 2003 | 2 | 335.000.00 | 4-05 | 000.00 | 2 | 335.000.00 |
| 22 | PT DIARMA KURNIAHANA SBY | PT | PPh | 08 - 07 | 2003 | DFKRM-611-000141 | 03 | 05 | 2003 | 2 | 905.500.00 | 4-05 | 000.00 | 2 | 905.500.00 |
| 23 | CV ANDHIKA RAYA JEMBER | PT | PPh | 10 - 07 | 2003 | EKSRR-526-0000025 | 28 | 06 | 2003 | 2 | 052.000.00 | 7-05 | 000.00 | 2 | 052.000.00 |
| 24 | KOPEGTEL JEMBER | PT | PPh | 10 - 07 | 2003 | CSAD-526-0001358 | 30 | 05 | 2003 | 2 | 107.810.00 | 10-05 | 000.00 | 2 | 107.810.00 |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.474.153.00 | | | | | | | | | | | | | | | |



LAMPIRAN - I

**DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMERINTAHAN DAERAH SELAKUK KAS DAERAH**

FORMULIR

101 PUT 1

Musim Panas, JULI, 2003

Lampiran 1
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : SE-PJ/454/PJ.2/20
Tanggall : 13 Juli 2001

| No. | NAMA PERUSAHAAN/ENTITAS/ZONATE/PERUSAHAAN | Alamat dan NPWP Zonat/Entitas | Jenis PPN | Tanggal | Pembayaran | Periode Set | Anggaran | Denda perperiode | PPN | Denda perperiode | PPN B | Denda perperiode | PPN C | Denda perperiode | PPN D | Denda perperiode | PPN E | Denda perperiode | PPN F | Denda perperiode | PPN G | Denda perperiode | PPN H |
|-----|---|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-----|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | KOPERTHI JEMBER | 0 07 2003 CSAD 626.000.000 | 25-05-2003 | 0 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 6.346.000.00 | 624.600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2b | KOMUNITAS JENDER | 0 07 2003 CSAD 626.000.000 | 26-05-2003 | 0 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 6.346.000.00 | 624.600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2c | KOMUNITAS JENDER | 0 07 2003 CSAD 626.000.000 | 26-05-2003 | 0 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 6.346.000.00 | 624.600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2d | KOPERTHI JEMBER | 0 07 2003 CSAD 626.000.000 | 26-05-2003 | 0 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 6.346.000.00 | 624.600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2e | PT. SUNCLOUD ELECTRIC IND | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 30.220.000.00 | 3.000.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2f | PT. GADING INDONESIA JEMBER | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 14.522.600.00 | 1.452.260.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2g | JAYAPURA LINER | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 2.430.000.00 | 243.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2h | TOPAZ RUMAH MURAH | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 0.324.000.00 | 32.400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2i | EXCELSIOR STARER | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 0.324.000.00 | 32.400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2j | KOH-GEN-DEA STARTER | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 0.324.000.00 | 32.400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2k | PT. LADOG INDONESIA JEMBER | 10 07 2003 JLUR 731-11522 | 10 07 2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 1.452.260.00 | 145.226.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2l | PT. GADING INDUSTRI JEMBER | 10 07 2003 CSAD 626.000.000 | 27-05-2003 | 10 07 2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 1.452.260.00 | 145.226.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2m | KONGSBER JEMBER | 17-07-2003 CSAD 626.000.000 | 28-05-2003 | 17-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 201.12.00.00 | 20.112.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2n | SUMBERDAYA PATTI WILUSO | 22-07-2003 DFDC 422.000.000 | 06-07-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 33.659.500.00 | 3.365.950.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2o | KOPERTHI JEMBER | 22-07-2003 CSAD 626.000.000 | 30-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 53.113.000.00 | 5.311.300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2p | ULUJOKO CENTRUM JEMBER | 22-07-2003 MAIN 626.000.000 | 06-07-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 8.530.000.00 | 853.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2q | CV. SARANA MANDIRI SDY | 22-07-2003 EGMAW 607.000.000 | 14-07-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 2.170.000.00 | 217.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2r | KOPETEL JEMBER | 22-07-2003 CSAD 626.000.000 | 30-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 71.656.00 | 7165.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2s | CV.GUNUNG ANYAR SBY | 22-07-2003 ERUDP-615.000.000 | 06-07-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 5.623.710.00 | 562.371.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2t | CV. INKA PERSADA JEMBER | 22-07-2003 EGMAW 606.000.000 | 03-07-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 5.006.210.00 | 500.621.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2u | PT RAJA BESI SEMARANG | 22-07-2003 CAWAT 549.000.1587 | 26-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 2.379.180.00 | 237.9180.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2v | CV. DUTA AMEGA JEMBER | 22-07-2003 EKSGY 524.000.000 | 26-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 3.700.821.00 | 370.0821.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2w | PT. PUTERA SUTRA CO. JKT | 22-07-2003 CINOSI 029-000346 | 26-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 2.816.564.00 | 281.6564.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2x | KOPARTNERATAMA PT2TEL WILUSO | 22-07-2003 DPOIC 423.000.000 | 11-06-2003 | 22-07-2003 | 12.13.000.00 | 22.000.00 | 1.540.089.250.00 | 154.965.025.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2y | J U M I A H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPBM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR FISIKA LAHARAN DAN KAS NEGARA ATAU
KASA DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

FORMULIR

1101 PPN 1

Lampiran
Kepatuhan Cicilan Jember No. 36
Nomor : KP-2-5-F-2001
Tanggal : 13 Ju - 2003

| KODE PENGGOLONGAN DILAKUKAN PADA: 1. PERIODE 2. TAHUN 3. BAGIAN | JUMLAH PENGOLONGAN DILAKUKAN PADA: 1. BULAN 2. QUARTER 3. TAHUN | MASSA PEGAWAI | TARIF PPN PERSEN | MASA PEGAWAI | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | PPN JENIS | PPN JENIS | PPN JENIS |
| | | | | (%) | (%) | (%) |
| 4. 10. 1. 1. 1. KABUPATEN JEMBER | 2500 | EXPOSED 0022 | 100 | 1340668.925,00 | 1340668.925,00 | 0,00 |
| 4. 10. 1. 1. 2. KABUPATEN KEDIRI | 2000 | KTPU B25.000.000,00 | 200 | 270.250,00 | 120.000,00 | 450.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 3. KABUPATEN SUMENEP | 2000 | GGG-L620.200.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 4. KABUPATEN JEMBRANA | 2000 | GWPH-S22.000.00 | 200 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 5. KABUPATEN TULUNGAGUNG | 2000 | GWPH-S22.000.00 | 200 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 6. KABUPATEN BLITAR | 2000 | GGGG-623.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 7. KABUPATEN KOREA | 2000 | GGGG-625.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 8. KABUPATEN SUMBER UNGASAN | 2000 | GGGG-625.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 9. KABUPATEN MAMPU | 2000 | GGGG-626.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 10. KABUPATEN KEDUNGWEJO | 2000 | GGGG-627.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 11. KABUPATEN JATIM | 2000 | GGGG-628.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 12. KABUPATEN MEGALUYEH | 2000 | GGGG-629.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 13. KABUPATEN MANTULOGO | 2000 | GGGG-630.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4. 10. 1. 1. 14. KABUPATEN HARAPAN JEMBER | 2000 | GGGG-631.000.00 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6. 1. PT METROSOL SELARAWADA | 2003 | PTPH-Z-624.000.00 | 07 | 102.303,00 | 102.303,00 | 0,00 |
| 6. 2. PT EXCFINDO JAKARTA | 2003 | PTEG-A-0.017.050 | 07 | 7.702.820,00 | 1.483.114,00 | 6.219.706,00 |
| 6. 3. PT SATELITINDO | 2003 | CYDK-K-055.000.374 | 07 | 70.300,00 | 47.000,00 | 23.300,00 |
| 6. 4. KOBEGTEL JEMBER | 2003 | DWEO-091.000.525 | 07 | 5.449.175,00 | 3.449.417,00 | 2.000.000,00 |
| 6. 5. KOBEGTEL JEMBER | 2003 | CSIA-D-628.000.0372 | 01 | 16.800,00 | 10.000,00 | 6.800,00 |
| 6. 6. PT MEDIUSEL SURABAYA | 2003 | DIETG-G-11.000.051 | 01 | 12.027.700,00 | 1.702.778,00 | 10.324.922,00 |



FORMULIR PENDAFTARAN MAGISTER DAN DIPLOMA

 Mata Kuliah (1) : SPT
 Pengembangan

NAMA PENGUNGIT : PT. TELKOM - KABINETTEL JEMBER

N.P.W.P : 01.000.073.1.620.039

FORMULIR 2

FORMULIR 3

KETERANGAN

TAKSONOMI

PERIODIK

JURNAL

BULETIN

PROSES

PAPAR

LAMPIRAN

CATATAN

JUMLAH

NIM

Lampiran 1
Keputusan Direktorat Jember Pejak
Nomor : KED 5/12/DZ/201
Tanggal : 13 Juli 2001

Gabutan : 1. Pindahkam angka (7) ke kolom C.1 2. Formulir SPT Masa Irdik (Formulir 1101 PUT 1
2. Pindahkam angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Mata Induk (Formulir 1101 PUT 1)



NPWP : 0 1 6 4 4 2 4 2 8 4 2 3 0 0 0

Nama WP : KOPERASI WREADATAMA P2TEL WILSUS

Alamat WP : JL. CISANGGARUNG NO.2 KM.70

BANDUNG

Kode Pos

0 0 0 0 0

Kode Jenis Pajak

(MAP)

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Urutan Pembayaran *)

P P N

bulan Juli 2003

0

Dituliskan sesuai draf pada halaman belakang lembar i

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Tahun

Dilihat Tahun Pajak

Setoran dimaksud

2 0 0 3

Berikut tanda tangan

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Dapat tanda tangan pada kolom bulan untuk setoran masa. Tidak boleh menggunakan STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berbeda

Nomor Ketetapan :

Dilihat sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Dituliskan dengan pembayaran rupiah per unit

Rp. 14,420,683

Terbilang :

Dituliskan dengan huruf

EMPAT BELAS JUTA EMPAT
RATUS DUA PULUH RIBU
ENAM RATUS DELAPAN
PULUH TIGA RUPIAH

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Wajib Pajak / Penyelot

Tanggal

Jember

Tgl. 04 AGUSTUS 2003

Q&O dari Tandatangan

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas,

Nama Jelas

KODRAT

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

+ 031-54112121
+ 62330-917-0077

+ 031-541124745-12345
+ 62330-917-0077-45
Jl. Sumber Baru
+ 62813

Perpustakaan + 031-541124745-12345
+ 62330-917-0077-45
Jl. Sumber Baru
+ 62813



Digital Repository Universitas Jember

Lampiran ke-1 Untuk Pembeli BKP / Penerima JKP

Faktur Penjualan /

BKP / Order *) TEL. 1154HK.B10/PE.05/04/85/2003

FAK T U R P A J A K

Nomor Seri : DPO/C - 423-0030033

GUSAHA KENA PAJAK :

n a : Koperasi Wredatama P2TEL Wilusa
 m a t : Jl. Cisanggarung No. 2 KM 70 Bandung
 N.P : 0 1 8 4 4 2 4 2 8 4 2 3 0 0 0
 Pengukuhan : 01.644.242.8.423.000

Tanggal : 00 - 07 - 1994

BELI BKP / PENERIMA JKP :

n a : PT. TELKOM KANDATEL JEMBER
 m a t : Jl. GALAH MADA 182 JEMBER
 N.P : 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6 2 6 0 0 1

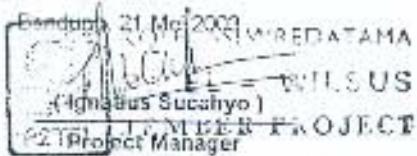
| Nama Barang / Jasa Kena Pajak | Kwantum | Harga Satuan | Harga Jual/Penggantian Uang Muka |
|--|---------|--------------|-------------------------------------|
| Pekerjaan Jaringan Tambahan Penyistemkan Lokasi Kandatel Jember | | | 144,206,830 |
| 1. Jl. Hes Cokro Aminata, SKW | | | |
| 2. Dawuhan Mangi, SKW | | | |
| 3. Jl. Sabaren, KLT | | | |
| 4. Jl. PB. Sudirman Cireh Ancar, RBP | | | |
| 5. Jl. Jelbug, AJS | | | |
| 6. Renteng Pancakarya, CGW | | | |
| 7. Rural Pacet, SPL | | | |
| 8. Desa Sepuran, SPL | | | |
| 9. Terminal Silo, SPL | | | |
| 10. Desa Silo, SPL | | | |
| Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka *) | | | 144,206,830 |
| Bersih / potongan harga / Uang Muka yang telah diterima *) | | | |
| Pengenaan Pajak | | | 144,206,830 |
| - 10 % x Dasar Pengenaan Pajak | | | 14,420,683 |

PPn. BM

% x DPP = Rp _____

% x DPP = Rp _____

Jumlah : Rp. _____



Catatan yang tidak perlu

L. 2A - 89

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 563/KMK.03/2003

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELEPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungut, Penyetoran dan Pelaporannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

VI MUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYITOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BERGKTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharuan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharuan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan peryerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharuan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 2

- (1) Bendaharuan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (3) Bendaharuan Pemerintah yang melirikkan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

Pasal 3

- (1) Dalam jumlah pembayaran yang dikenakan oleh Bendaharawan Pemerintah, atau Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara adalah dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal:
- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpotong-pecah;
 - Pembayaran untuk perbebasan tanah;
 - Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (PERSERO) PERTAMINA;
 - Pembayaran atas rekening telepon;
 - Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan atau
 - Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Digital Repository Universitas Jember

- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- (3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
- (2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Laluhan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak dipenuhi:

Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2009, yang dilakukan sampai dengan 31

Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum 31 Januari 2004.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipertuhui, kepada PKP rekanan atau Pemungut PPN dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Perunjukant Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyebaran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyebaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyebaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mula berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2003

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Ttd

BORDJONO



SURAT - TUGAS
No. 947 / 125 / 2/PP 9/2005

Lampiran 19

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini

| NO. | NAMA | NIM | JURUSAN |
|-----|-------------------|---------|------------------|
| 1. | Fandi Achmad | 02-1697 | D-III Perpajakan |
| 2. | Nurkhatul Hidayah | 02-1123 | D-III Perpajakan |
| 3. | Hairur Rusyid | 02-1139 | D-III Perpajakan |
| 4. | Suhartini Ningsih | 02-1165 | D-III Perpajakan |

Untuk mengikuti program kegiatan intellektual pada 10-11 Maret 2005 yang terlaksana mulai tanggal 07 Maret - 10-11 April 2005 Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



Diberikan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ,
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ,
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ,

SURAT – KETERANGAN

NO.Tel. 275 /PD620/RIS-D04/07/2005

General Manager Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : SUHARTINI NINGSIH

N I M : 020903101165

J U R U S A N : D - III PERPAJAKAN

N A M A I N S T I T U S I : F I S I P U N E J

Telah melaksanakan Magang di PT.TELKOM KANDATEL Jember. Pada tanggal 07 Maret 2005 s/d 07 April 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 April 2005
AN.GM.KANDATEL JEMBER



Committed 2U